

S K R I P S I

**PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

NURFADILLAH

E211 09 261



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
2013

ABSTRAK

Nurfadillah (E21109261), Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai, xiv + 98 Halaman + 1 Gambar + 6 Tabel + Pustaka 1989-2012 + 8 Lampiran. Dibimbing oleh Bapak Dr.H.M.Thahir Haning, M.Si dan Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA.

Kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dianggap potensial untuk menggenjot keuangan daerah adalah Pajak Reklame. Namun Realisasi penerimaan pajak tersebut beberapa tahun terakhir tidak mencapai target dan kontribusinya terhadap Pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih minim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak reklame dengan menganalisis segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, observasi dan cenderung pada telaah dokumen (data sekunder).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Sinjai ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan berkoordinasi dengan badan Perizinan dalam hal pemberian izin pemasangan reklame. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Reklame yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran secara rutin, masih adanya beberapa papan reklame yang masa berlakunya sudah habis namun masih terpasang, serta kurang tegasnya pihak dispenda itu sendiri dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Pendapatan Daerah untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif agar Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Reklame dapat ditingkatkan.

ABSTRACT

Nurfadillah (E21109261), Management of Advertisement Tax to Increase the Revenue of Sinjai, xiv + 98 Page + 1 Picture + 6 Table + Issue 1989-2012 + 8 Appendix. Supervised by: Dr.H. M.Thahir Haning, M.Si and Dr. Suryadi Lambali, MA.

The authority of local governments to implementation of each its finance is a form of the policy of regional autonomy which is demanding local governments to continue to improve the capability of creative and regional officials in an effort to explore the potential that can increase revenue. One of the sources of revenue considered potential to improve the local finance is the Advertising Tax. But in recent years, the realization of these tax revenues did not reach the target and the contribution to local tax and revenue is still low.

This study aims to determine how the management of advertisement tax by analyze the planning terms, execution and monitoring carried out by the Revenue Department of Sinjai. Troubleshooting methods used in this research is qualitative descriptive method. And the collecting data technique are interviews, observations, and documents review (secondary data).

The results of this study indicate that the Management of Advertising Tax in Sinjai is handled by the Department of Revenue and coordinated with agencies for licensing of Billboards installation. There are several constraints faced by the Advertising Tax management such as There still many taxpayers do not make payments on a regular basis, there were expired billboard but still attached, and indecision of the Revenue department give sanction to the violating taxpayer . These constraints are causing the lack of contribution to the tax revenue, but the presence of such barriers should be a challenge for the Revenue Department to seek appropriate more and effective solutions then that local revenue from the areas tax sector particularly in Advertising Tax can be improved.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NURFADILLAH**

NPM : **E211 09 261**

Program Studi : **Administrasi Negara**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 27 Februari 2013

Yang Membuat Pernyataan,



NURFADILLAH

NIM E211 09 261



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : NURFADILLAH
NIM : E21109261
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SINJAI

Telah diperiksa oleh ketua Program Sarjana dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang Proposal Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 November 2012

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.H.M.Thahir Haning, M.Si
Nip. 195705071984031002

Dr. Suryadi Lambali, MA
Nip.195901181985031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Sangkala, MA
Nip. 196311111991031002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penulis : NURFADILLAH
NIM : E 211 09 261
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SINJAI

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Studi Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin, pada Hari Rabu Tanggal 27 Februari 2013

Dewan Penguji Skripsi,

Ketua : Dr. H.M. Thahir Haning, M.Si (.....)
Sekretaris : Dr. Suryadi Lambali, MA. (.....)
Anggota : 1. Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si (.....)
2. Drs. H. Nurdin Nara, M.Si (.....)
3. Drs. Luthfi Atmansyah, MA (.....)

MOTTO DAN PERSEBAHAN

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan spesial

untuk

Kedua orang Tuaku

KATA PENGANTAR

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi ‘alamin.. kalimat terindah yang selalu terucap dari lisan ini, syukur yang tak berhingga hanya untuk **Allah *subhanahu wa ta’ala***, Pemilik segala Kesempurnaan, hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan, ampunan, dan akhir yang baik. Atas limpahan rahmat dan izin-Nyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam juga terkirim teruntuk Baginda **Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*** sebagai satu-satunya suri tauladan dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata I pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah melewati perjuangan panjang, dan pengorbanan. Namun berkat izin-Nya serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan seribu kesan yang tak terkira. Olehnya itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda **Darwis, S.Pd** dan Ibunda **St. Rukiah** “*The best parents in the world*”, serta Kakek nenek tersayang H. Bandu dan Hj. Amang, “*The best grandparents in the world*”, terima kasih atas do’a dan kasih sayangnya yang begitu besar serta kesabaran yang luar biasa dalam mendidik dan membesarkan anak dan cucu mu yang tersayang ini (semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan keselamatan untuk kalian), serta berbagai pihak yang

memberikan bantuan, bimbingan, kritikan dan petunjuk, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof Dr. dr. A. Idrus Patturusi selaku Rektor serta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hamka, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan dan para staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Sangkala, MA selaku Ketua Jurusan serta Ibu Dr. Hamsinah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr.H.Badu Ahmad, MA selaku pembimbing akademik yang selalu meluangkan waktu memberi arahan dan bimbingannya terkait masalah akademik penulis.
5. *Special thanks to:* Bapak **Dr.H.M.Thahir Haning, M.Si** selaku pembimbing I, dan Bapak **Dr. Suryadi Lambali, MA** selaku pembimbing II, atas kesediaan dan kesabaran untuk membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si** , Bapak **Drs. H. Nurdin Nara, M.Si** serta Bapak **Drs. Lutfi Atmansyah, MA** sebagai penguji penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu **Dosen pengajar** yang telah membekali ilmu selama menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unhas.
8. **Staf Jurusan Ilmu Administrasi** (Kak Accy, Kaka Rini, Ibu Ani dan Pak Lili) yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada penulis dalam berbagai hal selama menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi.

9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, beserta para staf terkhusus Kepala dan pegawai pada Bidang Pajak dan Retribusi, terimakasih atas sambutan hangat serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penelitian.
10. Buat Kakak Anti Balqis dan adik-adikku tersayang, Rani, Wahyu, Akkal, Si nakal Awi, & Si kecil Unhi. Juga buat Om dan tante-tanteku tersayang, H. Suaebah & Ambo P., Umar, S.Pd. & Nurdawati, S.Pd., H. Firman & Hj. Fitri, Bahri & Hijrawati, Muh. Jafar, ST. & Risna Yuliana, SE., dan Tante Lin (Marlina, M.Si), kalian tidak ubahnya sebagai orang tua kedua bagiku, selalu memberikan dukungan, *thanks so much*.
11. Sahabat senasib, dan sepenanggungan *Community Inspirate Of Administrator (CIA 09)* ‘Rika, Ima, Unhi, Muqe, Kurni, Adist, Upla, Fera, Fila, Aiy, Mita, Neni, Nova, Rara, Tety, Memey, sem, Rahma, Nia, Gaby, Chelunk, Uchenk, Alim, Erick, Adam, Roni, Denden, Anto, Ippank, Rizal, Yunus, Okta, Denis, Hans”. Saya bangga pernah menjadi bagian dari kalian ☺
12. *Crue Posko KKN Gel. 82 Kel. Macanre Kec. Lilirilau Kab. Soppeng* (Kk’ Wawan (kordes terbaik :D), Kk’ Imam (Si Cono’), Bang Fadhli, Aa’ Ridwan, Mas Agus, Mba’ Santy dan Jeng Mirna), atas supportnya dan tak lupa juga buat Bapak Kamaruddin dan Ibu Rahmawati yg telah menjadi Orangtua kami selama KKN, serta seluruh anggota Rempong’ers (**Mahasiswa KKN Se-Lilirilau Soppeng**) dan bapak supervisor kami. Masa-masa bersama kalian sungguh sangat menyenangkan, andai ada suatu keajaiban untuk mengulangi semuanya :)
13. Saudara serumahku di **Wisma Putri Halimah** (Kak Santi, Ecy ondeng, Kak Balqis, dan Kak Dian). Makan, nonton, tidur, sahur, puasa, masak, jail, ketawa, marah, sedih, nangis, kantong tebal, kantong tipis, dan semua kebersamaan dengan kalian adalah hal yang tidak terlupakan.

14. Sahabat-sahabatku **Alumni '09' SMK Neg. 1 Sinjai** (Zul, abang ummank', monick, Erna, Risna, Anti Loang, Ningsi), dan tak lupa **Alumni '06' SMP Neg. 2 Sinjai** serta **Alumni '03' SDN 152 Cemmeng**. Kalian akan menjadi cerita yang terindah dalam hidupku.
15. Kanda-kanda peace 04, Ksatria 05, Atmosfer 06, Creator 07, Bravo 08, terima kasih atas pelajaran dan pengalaman berharga yang telah diberikan dan untuk adik-adik Prasasti 010, Brilian 011, dan Relasi 012 teruslah berproses dalam bingkai Biru Kuning (Humanis Fisip UH)

Dan kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, yang pernah menjadi salah satu lakon pemeran utama, pemeran terbaik, terspesial, antagonis, protagonis, dan figuran dalam skenario hidup yang telah tercipta untukku, kalian adalah orang-orang pilihan untukku, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya, semoga **Allah subhanahu wa ta'ala** membalas kebaikan dan memberikan balasan yang setimpal. Amiin.

Akhir kata, **"Tak ada gading yang tak retak,"** tak ada manusia yang sempurna. Karena hal itu, sayapun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan tesis selanjutnya, Amiin. Semoga bermanfaat..!!! **Wassalam...**

Makassar, 21 Februari 2013

NURFADILLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian.....	6
I.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1 Konsep Pengelolaan	8
II.2 Fungsi Manajemen	9
II.2.1 Perencanaan.....	9
II.2.1 Pengorganisasian.....	13
II.2.1 Penggerakan.....	15
II.2.1 Pengawasan.....	19
II.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	21
II.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	22
II.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	22
II.4 Konsep Pajak.....	23
II.4.1 Pengertian Pajak.....	24
II.4.2 Fungsi Pajak.....	25

II.4.3 Asas Pemungutan Pajak.....	27
II.4.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	28
II.4.5 Pengelompokan Pajak.....	29
II.4.6 Pajak Daerah.....	31
II.5 Konsep Pajak Reklame.....	35
II.5.1 Pengertian Pajak Reklame.....	35
II.5.2 Objek Pajak Reklame.....	35
II.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	37
II.5.4 Dasar Hukum.....	38
II.6 Kerangka Konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
III.1 Pendekatan penelitian	41
III.2 Lokasi Penelitian.....	41
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian.....	42
III.4 Sumber Data.....	43
III.5 Narasumber dan Informan.....	43
III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
III.7 Teknik Analisis Data.....	44
III.8 Fokus Penelitian.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	46
IV.1 Kabupaten Sinjai.....	46
IV.2 Dinas Pendapatan Daerah	47
IV.2.1 Visi, Misi, dan Motto Dispenda Kabupaten Sinjai.....	48
IV.2.2 Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Sinjai.....	49
IV.2.3 Tugas Dan Fungsi Dispenda Kabupaten Sinjai.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN.....	74
V.1 Pengelolaan Pajak Reklame.....	74
V.1.1 Perencanaan.....	74

V.1.1 Pelaksanaan	81
V.1.1 Pengawasan.....	88
V.2 Peran Pajak Reklame Terhadap PAD.....	91
BAB VI PENUTUP.....	94
VI.1 Kesimpulan.....	94
VI.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Tabel Target Pajak Reklame Tahun 2007 – 2012	77
Tabel 5.2 Tabel Jumlah Pemasangan Reklame 2009-2012	81
Tabel 5.3 Tabel Daftar Nilai Sewa Reklame.....	83
Tabel 5.4 Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	90
Tabel 5.5 Tabel Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 – 2012.....	90
Tabel 5.6 Tabel Realisasi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun 2007 – 2012.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu media penggerak program pemerintah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing.

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa

sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, selain itu juga menjadi ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom hilang.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Keadaan keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Sinjai adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sumber pendapatan yang lainnya adalah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sinjai diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak air bawah tanah.

Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai tersebut adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau

industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai.

Pajak reklame di Kabupaten Sinjai di atur dalam Perda nomor 4 tahun 2012 tentang pajak reklame. Dalam Pasal 2 Perda tersebut dikatakan bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dan Objeknya adalah: a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/*slide*; dan j. Reklame peragaan.

Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan, terkhusus di Kecamatan Sinjai Utara sebagai jantung Kabupaten Sinjai. Namun realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya dari tahun 2009

hingga September tahun 2012. Presentasi penerimaan pada tahun 2009 hanya mencapai 52.19 % atau (41.754.000), tahun 2010 sebanyak 86.89 % atau (56.480.000), tahun 2011 menurun menjadi 85.58 % atau (55.630.000), adapun tahun 2012 mencapai target 103.65 %.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh pihak fiskus tidak memuaskan, Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperlukannya sanksi untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Masalah yang lain adalah kurangnya petugas luar yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G.R Terry. Keempat fungsi manajemen tersebut menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pertama perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame. Kedua pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa berlaku

reklame. Dan ketiga pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama batas pemasangan reklame.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimana pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ?
3. Bagaimana pengawasan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ?

I.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. **Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti sektor pajak reklame.

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pengelolaan pajak.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan referensi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai untuk lebih mengefektifkan pengelolaan pajak reklame.

3. **Teknis**

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan pajak Reklame.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan ialah :

“Istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola ‘*to manage*’ dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”

Pengertian di atas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Harsoyo (dalam Putra, 2011:1) mengemukakan bahwa

“Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”

Adapun menurut Wardoyo (dalam Putra, 2011:1) mengemukakan bahwa :

“Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Dari beberapa uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dalam pencapaian tujuannya. Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yakni Pertama untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Kedua, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan ketiga, mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang berbeda, salah satu cara yaitu menetapkan optimalisasi pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan pengelolaan.

Ketiga alasan tersebut di atas memberikan proporsi bahwa manajemen merupakan suatu tujuan yang harus dicapai, yang saling mendukung untuk tercapainya kegiatan efisiensi dan efektifitas dari suatu pencapaian tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Begitupun dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan keuangan suatu daerah. Dalam pengelolaan pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen terutama mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

II.2 Fungsi Manajemen

George R. Terry (dalam Siagian, 2003 : 85) merumuskan fungsi-fungsi Manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat menjadi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).

II.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi organik dari administrasi dan manajemen. Tanpa adanya perencanaan maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Menurut Siagian (2003 : 88) mengemukakan bahwa :

“Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan juga sebagai landasan pokok serta menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan”

Sedangkan Simbolong (2004 ; 36) mengemukakan pengertian dari perencanaan yakni :

“Sebagai suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana sesuatu pekerjaan hendak dilaksanakan serta menjadi persiapan (*preparation*) untuk tindakan-tindakan berikutnya”

Adapun menurut Hasibuan (2008) yang mengemukakan dalam Buku Manajemen Dasar, bahwa :

“Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, setiap perencanaan mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman”

Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. Suatu rencana berorientasi ke masa yang akan datang, karena itu ada beberapa hal yang penting untuk diingat dalam hubungannya dengan proses perencanaan itu. Hal-hal ini biasa disebut dalam teori administrasi dan manajemen sebagai *planning premises*. Pada dasarnya ada empat premis yang perlu dipegang teguh atau diingat yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sumber-sumber yang tersedia, atau mungkin tersedia, selalu terbatas sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas. Akibat premis ini ialah bahwa rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. Artinya logis apabila dikatakan bahwa sebelum membuat rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang dan akan tersedia perlu diketahui dengan tepat. Tidak didasarkan kepada dugaan-dugaan saja.

- b. Bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik bersifat positif yang berarti mendorong ke arah majunya organisasi, maupun bersifat negatif dengan kemungkinan akan menghalangi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena tidak ada satu organisasi yang dapat beroperasi dengan baik tanpa mengetahui kondisi-kondisi dan situasi itu. Tidak ada organisasi yang beroperasi dalam suasana kehampaan.
- c. Bahwa organisasi, tidak dapat melepaskan diri dari beberapa jenis pertanggung jawaban. Pimpinan organisasi bertanggung jawab pertama-tama kepada dirinya sendiri. Pimpinan organisasi bertanggung jawab kepada bawahannya, juga bertanggung jawab kepada pelanggan, serta kepada masyarakat luas. Implikasi dari premis ini ialah bahwa dalam membuat rencana dan melaksanakan kegiatan-kegiatan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
- d. Bahwa manusia yang menjadi anggota organisasi dihadapkan kepada keterbatasan, baik fisik, mental, maupun biologis. Oleh karena itu, harus selalu diusahakan terciptanya suatu iklim kerjasama yang baik. Dengan demikian manusia sebagai unsur pelaksana rencana dapat diajak untuk berbuat lebih banyak.

Tanpa memperhatikan keempat premis tersebut, kiranya dapat diramalkan bahwa manajemen sukar untuk menjalankan fungsi perencanaan itu dengan baik.

Untuk membuat suatu perencanaan yang baik, terlebih dahulu harus menjawab dua pertanyaan pokok, yakni apa (*what*) dan bagaimana (*how*).

Mengenai *what* dipersoalkan tentang apa. Di sini menunjukkan apa maksud tujuan dari pada pembuatan perencanaan itu. Tegasnya, *what* menjawab tentang tujuan apakah yang hendak dicapai, apakah tujuannya, maka kita membuat rencana. Jadi mengenai apa dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan. Jika pertanyaan tersebut telah terjawab maka kita berhadapan dengan *how*, yaitu bagaimana cara yang sebaik-baiknya harus dipergunakan atau dijalankan demi tercapainya tujuan tersebut. Yang penting dalam hal ini ialah mengenai cara/metode/sistem serta teknik yang harus dipergunakan.

Selain kedua pertanyaan tersebut maka kemudian akan muncul pertanyaan baru yakni *why*, *where*, *when* dan *who*. Setelah kita mengetahui apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut maka selanjutnya kita berada pada persoalan *why* (mengapa) dimaksudkan untuk mengetahui apa sebabnya. Lalu *where* menunjukkan dimana tempat kegiatan usaha (operasi) yang akan dilaksanakan. Lalu pertanyaan *when* menunjukkan bilamana atau kapan rencana dilaksanakan serta *who* menunjukkan siapa yang akan melaksanakan. Setelah menjawab pertanyaan tersebut di atas maka perlu juga diperhatikan beberapa sifat sebuah perencanaan yakni :

a. Rasional

Perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran dan perhitungan secara matang. Jadi bukan hanya hasil khayalan semata-mata sehingga dapat dibahas secara logis.

b. Lentur

Perencanaan itu harus luwes. Dimanapun dan dalam keadaan bagaimana pun perencanaan itu dapat cocok dan dapat mengikuti serta

dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan bagaimana pun juga.

c. Terus-menerus

Perencanaan harus bersifat *Continue* atau terus menerus. Ini berarti bahwa perencanaan harus terus menerus dibuat. Janganlah membuat perencanaan sekali saja seumur hidup atau untuk selama-lamanya.

II.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi organik dari administrasi dan manajemen yang perlu dilakukan setelah perencanaan. Pengorganisasian Pengorganisasian menghasilkan organisasi sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Adapun menurut Simbolong (2004:37) mengemukakan arti dari pengorganisasian yakni :

“Pengaturan setelah ada rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam/jenis serta sifat pekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukan bagian-bagian), tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana keuangannya, dan fasilitas-fasilitasnya”

Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Ada dua aspek utama dalam proses penyusunan struktur organisasi, yakni departementalisasi dan pembagian kerja (*division of labor*).

Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan/atau tampak dalam bagan suatu organisasi. Sedangkan pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Prinsip pembagian kerja ini merupakan tiang dasar pengorganisasian.

Pada dasarnya organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Organisasi sebagai alat dari manajemen

Yakni organisasi menjadi wadah atau tempat manajemen sehingga memberikan bentuk bagi manajemen yang memungkinkan manajemen dapat bergerak atau dapat dikaitkan.

b. Organisasi sebagai fungsi manajemen

Organisasi dalam arti dinamis (bergerak), yaitu organisasi yang memberi kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, dinamis berarti bahwa organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan.

Berdasarkan uraian pembagian organisasi di atas maka menunjukkan bahwa organisasi merupakan bagian penting dari manajemen. Dalam proses pengorganisasian ada beberapa langkah yang harus ditempuh yakni :

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang.

3. Mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien.
4. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis.
5. Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

II.2.3 Penggerakan (*Actuating*)

Pengarahan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. The Liang Gie (1989;210) menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai”

Adapun Siagian (2003;106) mengemukakan penggerakan adalah :

“Keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:

a. Prinsip mengarah pada tujuan

Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan.

b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan

Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Mereka mengkehendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan organisasi.

Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar. Sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Prinsip kesatuan komando

Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bilamana para bawahan hanya memiliki satu jalur didalam melaporkan segala kegiatannya. Dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan didalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal.

Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sebaik mungkin, dan

diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip diatas. Adapun cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa:

1. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya, orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengerian atas berbagai masalah yang dihadapinya. Pegawai lama yang pernah menjalani masa orientasi tidak selalu ingat atau paham tentang masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Suatu ketika mereka bisa lupa, lalai, atau sebab-sebab lain yang membuat mereka kurang mengerti lagi. Dengan demikian orientasi ini perlu diberikan kepada pegawai-pegawai lama agar mereka tetap memahami akan peranannya. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa diantara lain, :

1. Tugas itu sendiri
2. Tugas lain yang ada hubungannya
3. Ruang lingkup tugas
4. Tujuan dari tugas
5. Delegasi wewenang
6. Cara melaporkan dan cara mengukur prestasi kerja
7. Hubungan antara masing-masing tenaga kerja.

2. Perintah

Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang-orang yang berada dibawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi, perintah itu berasal dari atasan, dan ditujukan kepada para bawahan atau dapat dikatakan bahwa arus

perintah ini mengalir dari atas ke bawah. Perintah tidak dapat diberikan kepada orang lain yang memiliki kedudukan sejajar atau orang lain yang berada di bagian lain. Adapun perintah yang dapat berupa :

a. Perintah umum dan khusus

Penggunaan perintah ini sangat bergantung pada pimpinan, kemampuan untuk meramalkan keadaan serta tanggapan yang diberikan oleh bawahan. Perintah umum memiliki sifat yang luas, serta perintah khusus bersifat lebih mendetail.

b. Perintah lisan dan tertulis

Kemampuan bawahan untuk menerima perintah sangat mempengaruhi apakah perintah harus diberikan secara tertulis atau lisan saja. Perintah tertulis memberikan kemungkinan waktu yang lebih lama untuk memahaminya, sehingga dapat menghindari adanya salah tafsir. Sebaliknya, perintah lisan akan lebih cepat diberikan walaupun mengandung resiko lebih besar. Biasanya perintah lisan ini hanya diberikan untuk tugas-tugas yang relatif mudah.

c. Perintah formal dan informal

Perintah formal merupakan perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas/aktivitas yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sedangkan perintah informal lebih banyak mengandung saran atau dapat pula berupa bujukan dan ajakan.

3. Delegasi wewenang

Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan.

Kesulitan-kesulitan akan muncul bilamana tugas-tugas akan diberikan kepada bawahan itu tidak jelas, misalnya kesulitan-kesulitan dalam menafsirkan wewenang. Ini dapat menimbulkan keengganan bawahan untuk mengambil suatu tindakan.

Jelas adanya bahwa keberhasilan pimpinan mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung pada kemampuan untuk menggerakkan para pegawai/pekerja untuk sadar melaksanakan tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

II.2.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan termasuk sebagai fungsi organik dari manajemen, yakni memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Menurut Harold Kontz dan Cyrill O'Donnel (dalam Silalahi, 1989;174) menyatakan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewenan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya. Siagian (2003:112) mengemukakan arti dari pengawasan ialah :

“Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”

Pengawasan dilakukan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat *preventif* yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan yang ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai pelaksanaan pengawasan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan Langsung

Yakni aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat, pelaksanaan kegiatan yang sedang dijalankan

oleh para bawahan. Teknik ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Yakni pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Kelemahan dari pengawasan ini ialah seringkali para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja dan tidak dapat segera mungkin mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

II.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini Pamudji (dalam Kaho, 2007:138-139) menegaskan:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi

dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.

II.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Warsito (dalam Damang, 2011:1)

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Adapun menurut Herlina Rahman (dalam Damang, 2011:1)

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”

II.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuanganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang

Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
- d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
- e. Penerimaan Lain-Lain

II.4 Konsep Pajak

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian yang cuma-cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat.

Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air serta kepentingan umum lainnya. Kemudian selanjutnya dibuatkan suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsure keadilan lebih diperhatikan.

II.4.1 Pengertian Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets (dalam Ilyas 2004:4) menyatakan bahwa Pajak adalah

“Prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Darise, 2009:48) mengatakan bahwa Pajak adalah

“Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Ilyas, 2004:5), pajak merupakan :

“Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang telah dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Adapun menurut P.J.A Andriani (dalam Bohari, 2012:23) menyatakan pengertian pajak bahwa

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, antara lain :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

II.4.2 Fungsi pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasar dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas (2004:8) mempunyai dua fungsi yakni :

- a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan

undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemeritahan untuk investasi pemerintahan.

- b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatau alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complain*) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapat pelayanan yang semestinya.
- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

II.4.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith (dalam Bohari, 2001:41) mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yakni :

1. Asas persamaan (*equity*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2. Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini

kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya Pajak bumi dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

II.4.4 Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiskus*. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari *fiskus* (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Semi Self assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh *fiskus* kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan *fiskus* bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / *fiskus*).

II.4.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Munawir (dalam Nurmayasari, 2010:23) dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara

periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakan pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga

negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah :

- Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
 - Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
 - Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

II.4.6 Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 2 Undang-undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan;

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok.

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran;

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

II.5 Konsep Pajak Reklame

II.5.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan ataudidengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame

II.5.2 Objek Pajak Reklame

Dalam Undang-undang Pajak daerah dan Pajak Retribusi disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi :

- a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron merupakan Reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame megatron/vidiotron/*large electronic display* (LED) merupakan Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.

- c. Reklame kain yakni Reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat/stiker yakni Reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara yakni Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.
- i. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan objek Pajak Reklame yakni :

- a. Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan adakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor

II.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

II.5.4 Dasar Hukum

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini berdasar pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame. Teruntuk di Kabupaten Sinjai Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang pajak Reklame.

Dengan Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti

diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

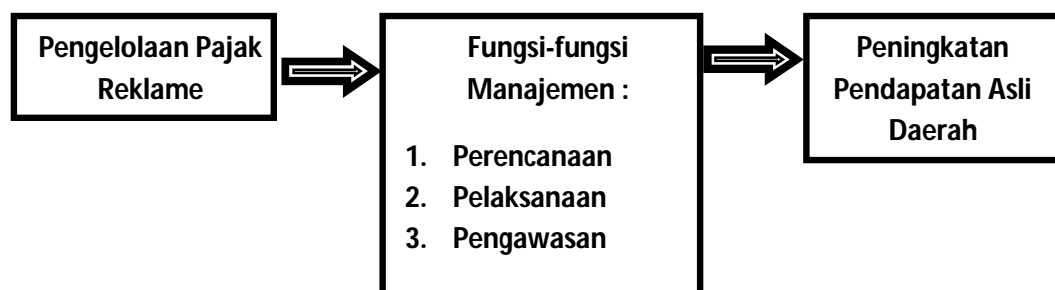
II.6 Kerangka Konsep

Seiring diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pajak Reklame. Akan tetapi penerimaan dari sektor Pajak Reklame ini belum maksimal. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sinjai dapat dilihat dengan mengidentifikasikan setiap permasalahan dalam pengelolaan penerimaan pajak reklame :

1. Pengelolaaan pajak reklame dalam penelitian ini ialah upaya pemerintah untuk memanfaatkan segala potensi daerah yang tersedia yakni salah satunya melalui pajak reklame.
2. Pengelolaann pajak reklame dapat ditinjau dengan fungsi manajemen menurut G.R Terry yang kemudian difokuskan oleh Bachrul Elmi (2002) menjadi 3 aspek yakni perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, dimana pengorganisasian dimuat dalam pelaksanaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan :
 - a. Perencanaan dalam penelitian ini adalah meliputi penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

- b. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring.
 - c. Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar pengelolaan pajak reklame berjalan sesuai rencana. Terutama pemantauan masa berlaku sebuah reklame.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diperoleh melalui keberhasilan yang diperoleh dari upaya pemerintah untuk mengelolah pajak reklame semaksimal mungkin sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir
Pengelolaan Pajak Reklame

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Menurut Sugiyano (2004: 1) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi untuk mendapatkan data yang valid untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian maka harus berlandaskan pada keilmuan yakni rasional, empiris dan sistematis. Pada bab ini penulis menjabarkan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

III.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai melalui pengelolaan pajak reklame.

III.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai instansi publik yang mengurus dan mengatur perpajakan di Kabupaten Sinjai.

III.3 Tipe Dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran, uraian dan penjelasan yang tepat menyangkut masalah prosedur pelayanan. Menurut Sukmadinata (2006:72) penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Sedangkan dasar penelitian ini lebih menfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurung waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.

Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak reklame.

III.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer namun lebih mengutamakan analisis data sekunder.

1. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.
2. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan.

III.5 Narasumber atau Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten sinjai, yaitu :

- a. Kepala bagian dan pegawai bagian pajak reklame Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai
- b. Wajib pajak reklame

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Telaah dokumen

Telaah dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan

data sekunder, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, undang, undang, buku-buku dan dokumen tentang Pajak Reklame, kemudian akan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan pengelolaan pajak reklame pada badan pendapatan daerah kabupaten sinjai.

3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

III.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

III.8 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan memperjelas terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut :

Pengelolaan merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten sinjai dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang terdiri atas 3 aspek, yaitu :

- a. Perencanaan yaitu mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta prosedur pemberian izin untuk pemasangan pajak reklame pajak reklame.
- b. Pelaksanaan yaitu pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring.
- c. Pengawasan yaitu pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pemantauan masa berlaku sebuah reklame.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 1190 48' 30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Luas Wilayah Daratan Kabupaten Sinjai adalah 819, 96 km² dan Kabupaten Sinjai memiliki garis pantai sepanjang 28 km yang terdiri atas wilayah pantai daratan panjang 17 km dan wilayah kepulauan dengan panjang garis pantai 11 km. Secara administratif, Wilayah Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu :

1. Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa
4. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan

Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah di Kecamatan Sinjai Utara, Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah

dataran tinggi dimulai dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Sedangkan kecamatan terunik adalah kecamatan Pulau Sembilan berupa hamparan 9 pulau yang berderet sampai mendekati Pulau Buton.

Visi misi Kabupaten Sinjai sebagai identitas wilayah pembangunan, disusun dengan pemahaman bahwa, Visi merupakan gambaran atau cita cita kesuksesan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab segenap unsur dan pelaku pembangunan itu sendiri, termasuk dari masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan.

- a. Visi yakni " Sinjai Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2013 "
- b. Misi antara lain :
 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
 2. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
 3. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.
 4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sehat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat berbasis kerakyatan yang berwawasan lingkungan.
 6. Meningkatkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah

IV.2 Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan

membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ada beberapa kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, namun Dinas Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

VI.2.1. Visi, Misi, dan Motto Dispenda Kabupaten Sinjai

a. Visi Dispenda Kabupaten Sinjai

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab.

b. Misi Dispenda Kabupaten Sinjai

1. Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah
2. Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah.

c. Motto :

“Kepuasan anda, kebanggaan kami”

VI.2.2. Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Sinjai

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Keuangan
 - c. Subag Program
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Evaluasi Pengembangan, Pengendalian dan Pendapatan yang terdiri dari :

- Seksi Analisis dan Pengembangan
 - Seksi Evaluasi Pendapatan
 - Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- b. Bidang Pajak daerah yang terdiri dari :
- Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah
 - Seksi Pendataan Pajak Daerah
- c. Bidang Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-Lain yang terdiri dari :
- Seksi Pendataan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain
 - Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain
 - Seksi penetapan dan penyelesaian keberatan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain
- d. Bidang PBB dan Bagi Hasil yang terdiri dari :
- Seksi PBB
 - Seksi Bagi Hasil
4. Unit Pelaksana Tehnis Dinas terdiri dari
- a. UPTD Pasar
 - b. UPTD TPI Lappa

VI.2.3. Tugas Dan Fungsi Dispenda Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi, koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam urusan ketatausahaan, keuangan, pembinaan organisasi dan tata laksana dan urusan umum dan kepegawaian serta mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pengendalian

dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit-unit kerja di Dinas Pendapatan Daerah Sinjai.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program pengelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit-unit kerja.;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas;
- g. Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan program pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program pendapatan daerah serta penetapan rencana strategis;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b.1 Sub Bagian Program

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program;
- b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran
- e. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
- f. Memimpin dan bertanggungjawab atas penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD)
- g. Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
- h. Menyusun rencana program penyediaan / perbaikan sarana dan prasarana jasa pelayanan masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah
- i. Bertanggungjawab atas penyiapan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
- j. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas penyusunan Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja SKPD
- k. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah

- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

b.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan mencari serta menginventarisir Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan Dinas;
- b. Menyiapkan usulan anggaran Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- e. Melakukan pembinaan kepada Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan SKPD Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- b. Melaksanakan tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan;

- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat;
- d. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- e. Menginventarisir kebutuhan benda-benda berharga unit-unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pencatatan serta penyaluran barang-barang kebutuhan/benda berharga kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Melakukan pencatatan barang Inventaris Dinas;
- h. Menghimpun dan mengolah data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi :
pengumpulan data pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
- k. Menyusun administrasi dan tata usaha kepegawaian baik pengangkatan CPNS, pengusulan pemberian penghargaan tanda jasa PNS berprestasi, pemberian cuti dan format penilaian kinerja pegawai
- l. Menyusun formasi dan perencanaan pegawai;

- m. Melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- n. Mengatur pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor lainnya.
- o. Melakukan pembinaan kepada Bendaharawan/Pemegang Barang
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Bidang Evaluasi Pengembangan, Pengendalian dan Pendapatan

Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah meliputi evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah oleh para SKPD Pengelola dan melakukan pelaporan berkala atas pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pengembangan sumber-sumber pendapatan dan perbaikan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- j. Memimpin pelaksanaan Evaluasi Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c.1 Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah

Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendapatan daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahannya;
- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dalam bentuk rekapitulasi hasil penagihan jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil;
- h. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahunan ;
- i. Melakukan pembukuan dan pelaporan mengenai tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- j. Melakukan pencatatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas;
- k. Melakukan pencatatan pembukuan dan pelaporan dengan menggunakan jenis blangko / kartu / benda berharga lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah secara berkala setiap bulan setiap 10 (sepuluh hari) sebagai bahan evaluasi
- m. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala dengan seluruh SKPD / Instansi / Unit Kerja pengelola pendapatan daerah
- n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan

c2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Pendapatan Daerah

Seksi Pengawasan dan Penertiban Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan seluruh SKPD / Instansi / Unit Kerja Pengelola PAD sebagai bentuk pengendalian;

- g. Mengkaji dan Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kemungkinan solusinya;
- h. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan SKPD / Instansi / Unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan penertiban pengelolaan pendapatan daerah;
- j. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian

c3. Seksi Analisis Pengembangan Pendapatan Daerah

Seksi Analisis Pengembangan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Menyiapkan data dalam rangka penyusunan rencana naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- g. Menyusun rencana besarnya rencana pendapatan daerah setiap tahun anggaran;
- h. Melakukan pembinaan teknis operasional pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja dalam mengelola dan merumuskan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dengan SKPD / unit kerja pengelola pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan SKPD / unit kerja pengelola dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber pendapatan daerah secara optimal;
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain di Pemerintah Kabupaten jika berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- I. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

d. Bidang Pajak Daerah

Dalam Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi perencanaan operasional, pengendalian dan evaluasi kegiatan pajak daerah meliputi, pendataan, penetapan, penagihan dan pelaporan pajak daerah serta fasilitasi penyelesaian keberatan bidang Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan menilai peningkatan karier bawahan
- j. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan Pajak Daerah;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pajak daerah dibantu oleh :

- 1. Seksi Pendataan Pajak Daerah
- 2. Seksi Penetapan Pajak dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan

d.1 Seksi Pendataan Pajak Daerah

Seksi Pendataan Pajak Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah
- g. Melakukan pemutakhiran basis data potensi pajak daerah secara berkala
- h. Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah
- i. Mencari, menghimpun dan mengolah data objek Wajib Pajak Daerah

- j. Membuat dan memelihara daftar induk Wajib Pajak Daerah
- k. Menyiapkan bahan formulir sebagai pedoman dan petunjuk pengisian pendaftaran Wajib Pajak
- l. Melakukan pendistribusian, pengadministrasian dan pelaporan atas pendaftaran Objek dan Wajib Pajak Daerah
- m. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- n. Melakukan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak.
- o. Melaksanakan pembinaan pajak daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah;

d.2 Seksi Penetapan Pajak dan Fasilitas Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Seksi Penetapan Pajak dan Fasilitas Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melakukan penghitungan dan penetapan pajak daerah baik penetapan secara jabatan maupun penetapan tambahan
- g. Melakukan perhitungan jumlah angsuran wajib pajak yang telah ditetapkan
- h. Menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta sistem pembayaran/angsurannya
- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pajak daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
- j. Memfasilitasi pengajuan keberatan dan banding di bidang pajak daerah sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menerima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding
- l. Mensosialisasikan produk peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya mengenai pajak daerah kepada masyarakat

- m. Melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan Wajib Pajak serta pemberian sanksi (denda) sesuai ketentuan berlaku
- n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

d.3 Seksi Penagihan dan Pelaporan

Seksi Penagihan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- f. Melakukan penagihan pajak daerah terutang berdasarkan Ketentuan yang berlaku
- g. Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada petugas kolektor
- h. Menyusun pelaporan penerimaan pajak daerah
- i. Melakukan pembinaan kepada para kolektor pajak daerah
- j. Mengkoordinasikan kegiatan penagihan dan pelaporan pajak daerah dengan SKPD / Instansi / unit kerja pengelola pajak daerah untuk kelancaran pengelolaan
- k. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah
- l. Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah
- m. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah sesuai target yang ditetapkan dan permasalahan yang ditemui di lapangan
- n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

e. Bidang Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-Lain

Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah meliputi Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan

Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain meliputi, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain serta Fasilitas Penyeselaian Keberatan bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bagi Hasil

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan

Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan serta melaksanakan perencanaan penerimaan dan pengkoordinasian potensi penerimaan Bagi Hasil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan
- j. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

HASIL PENELITIAN

V.1. Pengelolaan Pajak Reklame

Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam penelitian akan ditinjau tentang pengelolaan salah satu pajak daerah yakni Pajak Reklame. Pengelolaan pajak reklame di kabupaten Sinjai menemui beberapa masalah/kendala sehingga beberapa tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan per tahunnya.

Pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perizinan untuk meningkatkan pendapatan sinjai. Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dimana saling terkait satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan pajak reklame dengan sendirinya harus memasukkan ketiga aspek ini. Berikut deskripsi hasil dari penelitian yang telah dilakukan :

V.1.1. Perencanaan

Fungsi utama dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Dimana perencanaan yang dimaksudkan yakni sebagai proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Sebagai langkah awal dari pengelolaan maka kegiatan perencanaan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pajak reklame. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame yakni meliputi penentuan target dan mekanisme pemberian izin untuk pemasangan reklame. Berikut hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap perencanaan pajak reklame.

A. Penentuan Target

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan.

Upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan target pajak reklame yakni dengan mempertimbangkan potensi wilayah Kabupaten Sinjai yang strategis untuk pemasangan reklame dan pasar yang potensial, selain itu juga berdasar pada pencapaian target tahun sebelumnya.

Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ra selaku Kepala Bidang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah terkait fungsi perencanaan, mengatakan bahwa :

“Perencanaan kami lakukan dengan menentukan target pajak reklame pertahun. Untuk menentukan target tersebut kami berdasar pada tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelumnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan ”
(*Wawancara Jum’at 11 Januari 2013*)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Rb, selaku penanggung jawab Pajak Reklame (Selasa 15 Januari 2013), bahwa :

“Penentuan target juga memperhitungkan kondisi lokasi pemasangan reklame yang dikehendaki oleh Badan Perizinan yang dulunya diurus oleh Dinas Tata Ruang”

Adapun Mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut :

- a. Sebelum menetapkan target, maka langkah awal yang dilakukan ialah memantau spanduk di lokasi yang masih akan diperpanjang.
- b. Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya.
- c. Melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh Badan Perizinan, karena tiap tahunnya ada perubahan lokasi disebabkan pembangunan yang baru.
- d. Selain berpacu pada tahun sebelumnya, juga akan dibuat dengan pengolahan data, namun lebih cenderung pada patokan tahun sebelumnya.
- e. Setelah target telah ditetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.

Berikut disajikan data perubahan target pajak reklame beberapa tahun terakhir :

Tabel 5.1 Target Pajak Reklame Tahun 2007 - 2012

Tahun	Target
2007	40.000.000
2008	50.360.000
2009	80.000.000
2010	65.000.000
2011	65.000.000
2012	65.000.000

Sumber : Bidang Pajak dan Reklame, 2012

Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama enam tahun berturut-turut target yang ditetapkan tidak mengalami adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya pemerintah dalam meggenjot pemasuka daerah dalam Pendapatan Asli daerah melalui pajak reklame.

B. Pemberian Izin

Adapun selanjutnya adalah pemberian surat izin pemasangan reklame. Hasil wawancara kepada Rb selaku penanggung jawab pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai memberikan penjelasan bahwa :

“Setiap pihak yang ingin memasang reklame harus meminta izin kepada Dinas Perizinan terlebih dahulu. Setelah itu kita sama-sama meninjau lokasi yang diinginkan oleh pendaftar karena biasanya ada tempat yang ditentukan namun pendaftar tidak suka karena kawasannya terhalang dari visualnya. (Wawancara Selasa 15 Januari 2013)

Untuk pemberian izin maka sebuah reklame harus dengan standar yang ditentukan, yakni:

- a. Memenuhi standar etik yaitu tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. Standar Teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan daerah;
- e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan dalam hal pemasangan reklame berdasar pada standar di atas, masih kurang maksimal, di mana kenyataannya masih ada beberapa standar yang tidak diperhatikan dalam pemasangan reklame, padahal ini jelas telah diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun prosedur perizinan serta persyaratan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame , yakni :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - Izin Baru :
 - FC Kartu Tanda Penduduk pemohon/ identitas diri yang sah;

- Surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- FC Akte Pendirian perusahaan/TDP yang telah dilegalisir;
- Rekomendasi dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang
- FC STNK dan sejenisnya (Reklame berjalan)

➤ Perpanjangan :

- FC Kartu Tanda Penduduk pemohon/ identitas diri yang sah;
- Surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain
- FC SK Kepala Dinas tentang ijin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
- FC STNK dan sejenisnya (Reklame berjalan);
- Foto lokasi pemasangan terakhir.

2. Setiap Wajib Pajak atau kuasanya wajib melaporkan data subjek dan objek pajak (mengisi SPTPD);
3. Mengisi Surat Pernyataan yang disediakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (pernyataan bersedia bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dalam penyelenggaraan reklame, menurunkan/ mencabut/ memindahkan/ melepas gambar atau reklame apabila izin dan jangka waktunya berakhir ataupun belum berakhir apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.);
4. Surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan / mencabut gambar reklame bila masa berlaku izin telah berakhir (khusus untuk reklame berjalan);
5. Foto/ Gambar situasi/ denah lokasi yang jelas posisi titiknya;

6. Gambar Desain dan Contoh Naskah Reklame yang akan dipasang (khusus untuk reklame berjalan);
7. Untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil wajib melampirkan surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung;
8. Surat izin serah pakai tanah dari Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk tanah pemerintah, dan / atau menyerahkan akta bukti otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah dalam bentuk :
 - Perjanjian Sewa Menyewa
 - Perjanjian Sewa Pakai
 - Perjanjian dalam bentuk lain

9. Izin Titik Reklame

Titik lokasi reklame pada lokasi umum/ khusus yang lebih diminati dari satu pemohon, pemanfaatannya dilakukan melalui proses lelang atau penunjukan/penetapan yang pelaksanaannya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Berikut data terkait jumlah reklame yang diberi izin untuk dilakukan pemasangan pada Kabupaen Sinjai :

Tabel 5.2 Tabel Jumlah Pemasangan Reklame 2009-2012

No.	Tahun	Banyak Reklame
1.	2009	86
2.	2010	91
3.	2011	103
4.	2012	93

Sumber : Bagian Pajak dan Retribusi, 2012

Dari data yang disajikan di atas maka dapat dilihat bahwa sebagai wilayah Kabupaten pemasangan reklame ini di Kabupaten Sinjai termasuk banyak melakukan pemasangan reklame, maka selanjutnya akan ditinjau mengenai keseimbangan antara pemasangan reklame tersebut dan jumlah pajak yang diterima.

V.1.2. Pelaksanaan

Tahapan pengelolaan setelah perencanaan yakni pelaksanaan dimana segala hal yang telah direncanakan direalisasikan atau memungut dana dari pajak reklame yang telah menjadi hak daerah dengan maksimal. Proses pelaksanaan pajak reklame terdiri dari beberapa kegiatan yakni pembagian tugas, penghitungan tarif pajak, pembayaran dan penagihan.

1. Pembagian Tugas

Untuk melakukan pengelolaan pajak reklame maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan

kekosongan pada titik yang lain. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada

Ra selaku Kepala Bidang Pajak Daerah menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan pajak reklame hanya 1 orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, dimana orang yang ditunjuk tersebut beliau yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pajak reklame, baik pemberian izin, pemasangan, pencabutan, pemantau di lapangan dan sebagainya namun dalam hal pengelolaan data beliau tetao dibantu oleh pegawai lain”.

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa dalam hal pembagian tugasnya tidak menunjukkan adanya perhatian terhadap pengelolaan pajak reklame, dimana orang yang ditugaskan untuk mengelola pajak reklame ini hanya satu orang, sehingga jika melihat bagaimana pelaksanaannya untuk kedepannya akan tidak maksimal, dikarenakan pengelolaan pajak reklame ini mencakup banyak kegiatan dan tidak akan mudah jika dipegang oleh satu orang saja.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Rb sebagai penanggung jawab pajak reklame mengatakan bahwa :

“Memang dari kantor saya ditunjuk sebagai penanggung jawab penuh pajak reklame namun saat ini sudah ada peraturan mengenai kerja sama Pihak Dispenda dan Satpol PP dalam hal penertiban reklame-reklame yang masih terpasang namun telah habis masa izinnya maka itu akan ditertibkan oleh Satpol PP sebagai Tim Penertib”

2. Penghitungan Tarif Pajak

Sebelum melakukan pemungutan pajak maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan tarif. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah, sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan kepada Rb mengatakan bahwa :

“Tarif pajak reklame dihitung oleh kami dengan rumus yang telah ditetapkan dan setiap reklame berbeda-beda cara perhitungannya
(Wawancara Selasa 15 Januari 2013)

Berikut ini penetapan nilai sewa pajak reklame sesuai dengan jenisnya (nilai kontrak), berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 Tahun 2012

Tabel 5.2 Daftar Nilai Sewa Reklame

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, 2012

a. Reklame Billboard, Videotron, Megatron, Neon Box dan Sejenisnya

NO	JENIS REKLAME	NILAI KONTRAK			NILAI STRATEGIS (Rp.)
		LOKASI	UKURAN	HARGA SATUAN (Rp.)	
1.	Papan Billboard/	A	/M ²	20.000/Bulan	25.000/Bulan
	Videotron/ Megatron/	B	/m ²	17.000/bulan	17.000/ bulan
	Bando Jalan/	C	/m ²	17.000/bulan	10.000/ bulan
	Neon Box Dan Sejenisnya				
2.	Baliho	A	/m ²	20.000/ bulan	30.000/ Bulan
		B	/m ²	17.000/ bulan	25.000/ Bulan
		C	/m ²	10.000/bulan	20.000/ Bulan
3.	Kain (Spanduk/ Umbul-umbul, Banner) dan sejenisnya	A	/m ²	500 / bulan	15.000/ Bulan
		B	/m ²	450 / bulan	10.000/ Bulan
		C	/m ²	400 / bulan	8.000/Bulan

b. Reklame melekat (stiker) dan sejenisnya

NO.	NILAI KONTRAK				NILAI STRATEGIS (Rp.)
	UKURAN	LOKASI	HARGA SATUAN (Rp.)	LAMA PEMASANGAN	
1.	Stiker s/d $\frac{1}{4}$ m ²	A	Rp. 100/lbr	3 bulan	Rp 300
		B	Rp. 75/lbr	3 bulan	Rp 200
		C	Rp. 50/lbr	3 bulan	Rp 100
2.	Stiker > $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	A	Rp. 200/lbr	3 bulan	Rp 400
		B	Rp. 150/lbr	3 bulan	Rp 300
		C	Rp. 100/lbr	3 bulan	Rp 200

c. Reklame Selebaran dan sejenisnya

NO.	NILAI KONTRAK			NILAI STRATEGIS (Rp.)
	UKURAN	LOKASI	HARGA SATUAN (Rp.)	
1.	Selebaran s/d $\frac{1}{4}$ m ²	A	Rp.100/1 kali	Rp. 200
		B	Rp. 75/1 kali	Rp. 150
		C	Rp. 50/1 kali	Rp. 100
2.	Selebaran > $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	A	Rp.100/1 kali	Rp. 250
		B	Rp. 75/1 kali	Rp. 200
		C	Rp. 50/1 kali	Rp. 150

d. Reklame Berjalan dan sejenisnya

NO.	JENIS KENDARAAN	NILAI KONTRAK			NILAI STRATEGIS (Rp.)
		m ² /Bulan	m ² /Triwulan	m ² /Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Mobil :				
	- 4 Roda	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 60.000	Rp. 50.000
	- 6 Roda	Rp. 6.000	Rp. 18.000	Rp. 72.000	Rp. 75.000
	- 10 Roda	Rp. 10.000	Rp. 30.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000
b.	Sepeda Motor	Rp. 4.000	Rp. 12.000	Rp. 48.000	Rp. 40.000
c.	Gerobak	Rp. 3.000	Rp. 9.000	Rp. 36.000	Rp. 25.000

e. Reklame Udara dan sejenisnya :

Nilai Sewa Reklame : Rp 10.000,- per hari

f. Reklame Apung dan sejenisnya :

Nilai Sewa Reklame : Rp 10.000,- per hari

g. Reklame Suara dan sejenisnya :

Reklame suara : Rp 6.750,- per penyelenggaraan

h. Reklame film/ slide dan sejenisnya :

b. Film :Rp 2.500,-/ menit

c. Slide :

a) Dengan suara : Rp 1.350,- sekali tayang

b) Tanpa suara : Rp 900,- sekali tayang

i. Reklame Peragaan :

Nilai Sewa Reklame : Rp 10.000,- untuk setiap peragaan per hari.

Berdasarkan daftar satuan nilai harga sewa tersebut dapat dilakukan penghitungan total yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan wawancara yang dikemukakan diatas, penghitungan dilakukan oleh pihak dari Dinas Pendapatan Daerah. Dengan demikian wajib pajak hanya datang membayar sesuai dengan yang telah ditetapkan, jadi dalam hal ini menghindari adanya kecurangan.

2. Pembayaran dan Penagihan

Kegiatan selanjutnya dari pelaksanaan adalah pembayaran. Ra mengemukakan bahwa :

“Setelah dilakukan penghitungan maka wajib pajak datang ke kantor untuk membayar pajak reklame yang mereka pasang”

Berikut hasil wawancara terkait dengan pembayaran yang selama ini dilakukan wajib pajak menurut Rb:

“Dalam hal pembayaran oleh pihak pemilik usaha/produsen khususnya yang berasal dari Makassar sangat menyadari kewajibannya untuk membayar pajak, mereka peka dengan hal ini sehingga kami juga senang menerima pendor-pendor dari Makassar”

Namun lain halnya dengan pembayaran objek yang berupa baliho pilkada. Informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah, yang mengatakan bahwa :

“Rata-rata baliho pilkada yang terpasang itu tidak bayar, padahal kan itu diatur dalam perda dan perbup, mereka tidak bayar dengan alasan balihonya tidak berunsur komersial, walaupun ada yang bayar kontribusinya “hanya 1 persen saja” (*Wawancara Jum’at 11 Januari 2013*)

Dilain pihak, penanggung jawab pajak reklame juga memberikan penjelasan mengenai kegiatan perencanaan, dimana beliau menjelaskan sebagaimana wawancara di bawah ini :

“Baliho Pilkada selama ini memang banyak yang tidak bayar, karena baru tahun 2012 digerakkan sosialisasi tentang itu dan penegakan perda maka selanjutnya akan disurati jika masih ada yang belum bayar karena sudah ada tim teknis yang bekerjasama dengan Satpol PP. Justru yang tahu aturan mereka yang suka melanggar”

Dengan adanya tanggapan seperti itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab dari tidak tercapainya target pajak reklame beberapa tahun terakhir. Hal tersebut harus ditindak lanjuti segera mungkin sehingga tidak berlarut-larut seperti itu terus. Namun penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya pihak Dinas Pendapatan Daerah kurang tegas dalam melakukan pemungutan ataupun penagihan kepada pihak terkait. Baliho pilkada memang tidak memiliki unsur komersial namun

baliho tersebut menarik perhatian umum untuk memperkenalkan orang/pasangan caleg yang ditempatkan atau dapat dilihat oleh umum, sebagaimana dalam pengertian reklame seperti itu. Bukan hanya dari pengertian namun juga telah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan juga Peraturan Daerah No. 4 thn 2012 tentang Pajak Reklame yang ada di kabupaten sinjai bahwa baliho pilkada tersebut sama statusnya dengan reklame yang berunsur komersial yakni wajib membayar wajib pajaknya.

Padahal telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 13 mengenai Pembayaran dan Penagihan pajak reklame,

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dan dilanjutkan dengan pasal 13 ;

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

V.1.3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Adapun jenis pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasa tidak langsung.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah, mengatakan bahwa :

“Kami selalu melakukan pengawasan langsung. Memantau letak dan kondisi reklame di lapangan serta sering mendatangi pihak yang malas melakukan pembayaran dan kepada pihak yang jatuh tempo tapi belum menurunkan reklamenya” (*Wawancara Jum’at 11 Januari 2013*)

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Rc selaku wajib pajak reklame menyatakan bahwa :

”Masalah pengawasan, ia ada beberapa pihak berwenang yang selalu datang memantau reklame-reklame yang kami pasang dan mendatangi kami jika kami telat melakukan pembayaran”

Mengenai pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, menurut hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk yang jatuh tempo namun belum menurunkan reklamenya maka kami memberi peringatan dan tenggang waktu namun kalau tidak didengar maka kita akan menurunkan reklamenya” (*Wawancara Selasa 15 Januari 2013*)

Kemudian penuturan dari Kepala Bidang Pajak menuturkan bahwa:

“Kami tidak memberi sanksi karena kalau diberi maka memungkinkan pengusaha lari maka pendapatan pun akan berkurang, kita hanya melakukan pendekatan agar mereka tidak melanggar lagi”

Adapun penuturan Rd selaku wajib pajak mengemukakan bahwa :

“Pihak kami memang terkadang terlambat melakukan pembayaran karena ada kalanya keuntungan kami juga menurun sehingga belum melakukan pembayaran, dan jika terlambat kami selalu ditegur tapi kami berusaha untuk memberi pengertian kepada pihak terkait agar diberi waktu dan tidak menurunkan reklame kami”

Proses pengawasan yang dilakukan ialah melakukan pemantauan di lapangan dan menyesuaikan dengan data yang telah diperoleh, kemudian jika terjadi adanya penyimpangan maka telah di atur dalam Peraturan Pajak reklame mengenai pengendalian dan pengawasan pajak reklame dinyatakan bahwa Tim Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dibentuk berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :

- a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ijin;
- b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki ijin;
- c. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- d. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan ijin dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya ijin tidak dibongkar oleh Orang pribadi atau badan yang mengadakan/menyelenggarakan reklame, maka Tim penertiban Pajak dan retribusi daerah berwenang membongkar reklame yang bersangkutan

Adapun terkait masalah sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran yaitu :

1. Kekurangan pajak yang terutang pada STPD dalam tahun pajak berjalan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
2. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
3. Denda tersebut merupakan penerimaan Negara.

Selanjutnya wawancara kepada salah seorang pegawai pada bidang pajak yakni Re Dispenda Kab. Sinjai dengan mengajukan pertanyaan terkait pemungutan liar dan beliau menanggapi bahwa :

“Selama ini berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan belum pernah terjadi adanya pemungutan liar dalam pajak reklame karena wajib pajak telah mengenali petugas pajak yang memang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan, dan rata-rata wajib pajak melakukan pembayaran di Kantor Dispenda secara langsung sehingga hal tersebut tidak akan memberikan celah untuk adanya pemungutan liar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa dalam hal pengawasan sudah rutin dan bisa dikatakan maksimal namun evaluasi dari hasil pengawasan itu belum optimal, dimana sanksi yang seharusnya diberikan

kepada wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan, karena pihak berwenang tidak mau jika pemasangan reklame berkurang akibat pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar. Namun pada dasarnya hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya target pemungutan.

V.2. Peran Pajak Reklame Terhadap PAD

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Sinjai sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola secara optimal. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Adapun salah satu potensi pajak daerah di Kabupaten Sinjai yakni pajak Reklame.

Pajak reklame sebagai salah satu Pajak Daerah dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan ujung tombak pembangunan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".

Tabel 5.4

**Data target dan Perealisasian Pendapatan Asli daerah
Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2009-2012**

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2009	63.637.654.749.98	94.212.432.011.01	148.05 %
2010	170.372.661.490	136.700.477.820.76	80.24 %
2011	182.076.751.085.00	181.198.326.667.06	99.52 %
2012	110.835.990.078.09	121.290.709.670,73	109.43 %

Sumber : Bagian Keuangan, 2012

Jika melihat Tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2009 realisasi penerimaan PAD menunjukkan hasil yang maksimal yakni melebihi dari target yang ditetapkan, namun memasuki tahun 2010 menurun dan bahkan tidak mencapai target, dan selanjutnya tahun 2011 meningkat namun belum mencapai target, sedangkan tahun 2012 pencapaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah hamper maksimal, namun perlu lagi ditingkatkan agar lebih meningkat dari tahun ke tahun dan penerimaannya bisa mencapai target setiap tahunnya.

Tabel 5.5

Data Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2009-2012

No.	Tahun	Pajak Reklame	PAD	Kontribusi
1.	2009	41,754,500	94,212,432,011.01	0.04
2.	2010	56,480,000	136,700,477,820.76	0.04
3.	2011	55,630,000	181,198,326,667.06	0.03
4.	2012	67.374.550	121.290.709.670,73	0,05

Sumber : Bagian Keuangan, 2012

Data tersebut di atas menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD tidak mencapai 1 %, dan di tahun 2011 sangat rendah yakni hanya 0.03 %, dan tahun 2012 meningkat hanya 0.05 %. Ini menunjukkan bahwa pajak reklame

belum tergali secara maksimal dan diharapkan agar pemerintah lebih menggenjot penerimaan pajak reklame karena dari beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah, pajak reklame termasuk dalam kategori berpotensi.

Tabel 5.5

Data Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun 2009-2012

No.	Tahun	Pajak Reklame	Pajak daerah	Kontribusi
1.	2009	41,754,500	2,391,126,140	1.75
2.	2010	56,480,000	2,497,680,923	2.26
3.	2011	55,630,000	3,035,576,248	1.83
4.	2012	67,374,550	3,621,248,360	1.86

Sumber : Bagian Keuangan, 2012

Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola di kabupaten sinjai dan salah satunya adalah pajak reklame. Dari data di atas menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah secara keseluruhan dan hasilnya menunjukkan masih rendahnya kontribusi yang diberikan. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan dalam rangka pencapaian penerimaan pajak dan juga karena kurang maksimalnya kegiatan penyetoran yang dilakukan para wajib pajak (masyarakat). Melihat kondisi tersebut maka untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah maka perlu penegakan hukum terhadap wajib pajak yang kurang memperhatikan kewajibannya dan perlu lagi adanya usaha untuk menarik perhatian para pengusaha untuk melakukan pemasangan reklame di kabupaten sinjai karena sebagaimana diketahui wilayah kabupaten Sinjai berpotensi dalam bidang perdagangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian pada bab-bab sebelumnya yang membahas pengelolaan pajak reklame kabupaten sinjai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan pajak reklame yang dilakukan selama ini belum optimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun, khususnya 4 tahun terakhir tidak mencapai target dan kontribusinya terhadap pajak daerah maupun terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat rendah. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai masih banyak menemui kendala-kendala yang menghambat pengelolaan pajak reklame terutama dalam hal pemungutannya.

1. Perencanaan dalam hal ini penetapan target pertahun pajak reklame, belum optimal dikarenakan tidak lengkapnya data-data yang harus dijadikan acuan dalam penentuan target. Kemudian belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan dalam pemberian izin pemasangan sehingga masih ada saja yang melakukan pemasangan diwilayah yang tidak diperbolehkan, hal ini akan mempengaruhi pemasukan pajak reklame.
2. Pelaksanaan dalam hal ini penghitungan dan pemungutan pajak. Dalam hal penghitungan tidak menemukan masalah namun pemungutannya masih banyak kendala yang dihadapi, seperti masih rendahnya

kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya pembayaran pajak yang menjadi roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai dan Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

3. Pengawasan, dalam hal ini pemantauan yang dilakukan untuk evaluasi masih kurang maksimal, sehingga masih ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Selain itu belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pajak reklame dengan melihat hasil dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal perencanaan, sebaiknya sebelum menetapkan target maka perlu adanya pendataan terhadap reklame-reklame dari tahun sebelumnya yang akan diperpanjang masa pemasangannya dan pendataan terhadap penetapan badan perizinan mengenai wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame, sehingga saat pemberian izin pemasangan tidak lagi memasuki kawasan yang terlarang karena hal tersebut merupakan pelanggaran.
2. Kepada penanggung jawab pajak reklame terkhusus reklame pilkada agar tetap melakukan pemungutan, dan melakukan tindak lanjut secara tegas ketika pihak pemasang reklame pilkada tersebut enggan melakukan pembayaran, karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga pajak tersebut wajib bagi mereka.

3. Kepada Kepala Bidang Pajak agar terus melakukan pengawasan secara efektif sehingga tak ada lagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu jangan takut untuk memberikan sanksi kepada pihak yang memang melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Prakosa Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA
- Darwin, Drs. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Universitas Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen : Dasar Pengertian, dan Masalah*, revisi Cetak 7. Jakarta. Bumi Aksara
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat
- Kaho J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Rineka Cipta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Marsiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi Yogyakarta
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung ; Mandar maju
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jogjakarta. Rajawali Pers
- Simbolon, Maringan masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sugiyano. 2003. *Metode Penelitian administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Rosda Karya

The Liang Gie. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Andi Offset

Ulbert, Silalah.1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung. Sinar Baru Algesindo

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pustaka Yudisia

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Skripsi :

Agustinus, Marius. 2011. Analisia Proses Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar

Nurmayasari, Dini. 2010. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang. Skripsi.Universitas Diponegoro

Sartika, Dewi. 2012. Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya). Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar

Lainnya :

Putra, Zulfikar. Pengertian Pengelolaan.2011. <http://id.shvoong.com/writing-ndspeaking/presenting/2108155pengertian-pengelolaan>

Damang. Pendapatan Asli Daerah. <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>

RIWAYAT HIDUP



Nama : NURFADILLAH

Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 16 September 1991

Alamat Makassar : Minasa Indah Residence Blok. D No. 9

Agama : Islam

Orang Tua : Ayah : Darwis, S.Pd

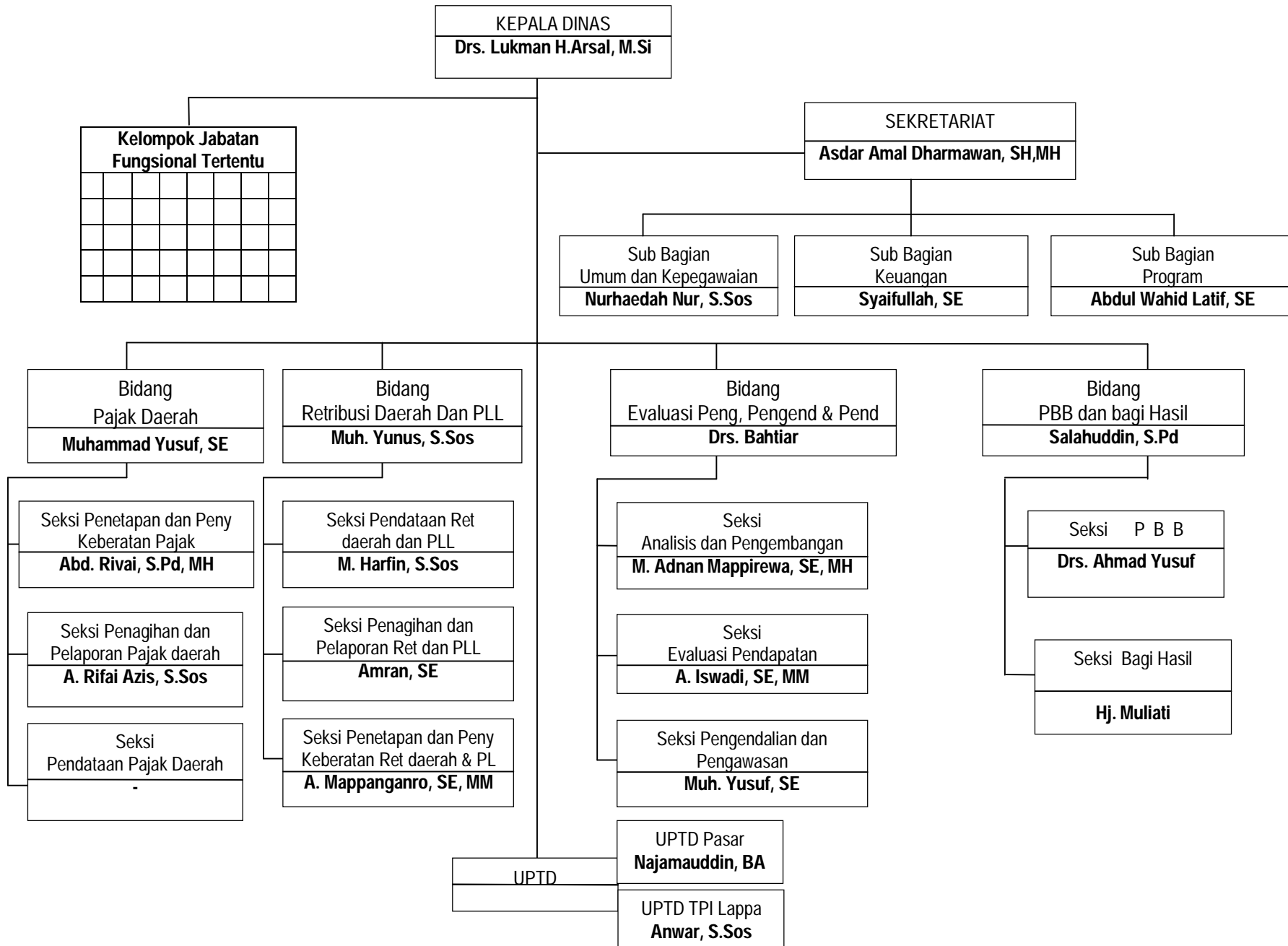
Ibu : St. Rukiah

Riwayat Pendidikan :

- SDN 152 Cemmeng (1997-2003)
- SMP Negeri 2 Sinjai Utara (2003-2006)
- SMK Negeri 1 Sinjai Utara (2006-2009)
- Universitas Hasanuddin, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP (2009-2013)

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



LAMPIRAN 2

SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

DATA PEGAWAI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1	
2	Golongan III	37	
3	Golongan II	29	
4	Golongan I	-	
	Jumlah	67	

DATA PEGAWAI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SINJAI

BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana	5	
2	Sarjana S.1	38	
3	Diploma III	4	
4	Diploma II	-	
5	SLTA	20	
6	SLTP	-	
7	SD	-	
	Jumlah	67	

DATA PEGAWAI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SINJAI

NO	NAMA	GOL.	NO	NAMA	GOL.
1	Drs. Lukman H. Aarsal,M.Si Nip. 19540929 198108 1 001	IV.C	2.	Asdar A. Darmawan SH, MH Nip. 19761114 200003 1 002	III.d
3.	Drs. BAHTIAR Nip. 19661220 199312 1 003	III.d	4.	Muhammad Yusuf A, SE Nip. 19601231 198603 1 230	III.d
5.	MUH. YUNUS, Sos Nip. 19591231 198603 1 205	III.d	6.	SALAHUDDIN, S.Pd Nip. 19651231 19861 1 033	III.d
7.	JUNAID Nip. 19560505 198101 1 014	III.d	8.	NAJAMUDDIN,BA Nip. 19591231 198103 1 124	III.d
9.	M. ARFIN Nip. 19641231 198603 1 208	III.c	10.	Hj. MULIATI Nip. 19591231 198609 2 003	III.c
11.	ABDUL RIVAI S.Pd MH Nip. 19610303 198603 1 017	III.c	12.	M. Adnan Mappirewa, SE Nip. 19740605 200312 1 011	III.b
13.	Drs. AHMAD YUSUF Nip. 19620520 200604 1 008	III.b	14.	Muh. YUSUF, SE Nip. 19630730 200604 1 005	III.b
15.	Nurhaedah Nur,S.SOS Nip. 19721225 199203 2 006	III.b	16.	SYAIFULLAH, SE Nip.197505 200604 1 005	III.b
17.	A. ISWADI, SE,MM Nip. 19781011 200312 1 005	III.b	18.	ABD. WAHID LATIEF, SE Nip. 190730311 200701 1 019	III.b
19.	ANWAR, S.Sos Nip. 19691230 200701 1 023	III.b	20.	A. RIFAI ASIS, S.Sos Nip. 19690623 200701 1 015	III.b
21.	AMRAN, SE Nip. 19730406 200701 1 021	III.b	22.	A. BAHARUDDIN, S.Sos Nip. 19711127 200701 1 016	III.b

23.	MULIYATI,SE Nip. 19760310 200701 2 021	III.b	24.	A. OCTAVE AMIR, S.Sos Nip. 19770808 200701 1 020	III.b
25.	WARTAWATI, SE Nip. 19731210 200701 2 013	III.a	26.	MUH. ASNAL ARIFIN Nip. 19740616 200701 1 019	III.a
27.	SAHARDI, S.Sos Nip.19700501 200701 1 025	III.a	28.	A. DANIAL Nip. 19690430 200701 1 017	III.a
29.	ASKARI RAHMAN Nip. 19680909 199303 1 012	III.a	30.	SOFWAN SABIRIN, S.Sos Nip. 19790609 201001 1 007	III.a
31.	A. MAPPANGANRO, SE Nip. 19790713 201001 1 009	III.a	32.	MAPPABENTENG, S.Ip Nip. 19770116 200801 1 006	III.a
33.	FADLI, SE Nip. 19830405 200801 1 020	III.a	34.	A. Baso Mangunrawa, SE Nip. 19860718 201001 1 017	III.a
35.	A.Putriyani Langgara, SE NIP. 19760424 201001 2 008	III.a	36.	Hj. HASRIAH, S.Ip Nip. 19790723 201101 2 005	III.a
37.	AFRYANTI, SE Nip. 19860929 201101 2 014	III.a	38.	SALAMAD, SE Nip. 19841231 201101 1 013	III.a
39.	UMMI HANDAYANI, A. Md Nip. 19860626 201001 2 045	II.c	40.	HISMA ISMAIL, A.Md Nip. 19750618 201101 2 003	II.c
41.	Yuliana Abubakar, S.Ag Nip. 19730128 200701 2 005	II.b	42.	SUKMAWATI HM Nip. 19710914 200701 2 012	II.b
43.	SUKMAWATI M Nip. 19770127 200701 2 014	II.b	44.	DADANG SAIFUDDIN Nip. 19730930 200701 1 011	II.b
45.	MULIATI Nip. 19720527 200701 2 015	II.b	46.	NURRIDAWATI Nip. 19750508 200701 2 020	II.b

47.	MUH. AMIR. A Nip. 19720307 200701 1 018	II.b	48.	HARSAN Nip. 19760501 200701 1 012	II.b
49.	ABDULLAH Nip. 19670307 200701 1 022	II.b	50.	ISHAK Nip. 19851202 200701 1 005	II.b
51.	HARRANG Nip. 19720627 200701 1 022	II.b	52.	ABU BAKAR Nip. 19650515 200604 1 011	II.b
53.	AHMADONG Nip. 19750622 200701 1 015	II.b	54.	DIRMAN Nip. 19741110 200701 1 023	II.b
55.	HAERUDDIN Nip. 19720617 200701 1 022	II.b	56.	BAUZA Nip. 19670313 200701 1 037	II.b
57.	RAFIDAH. M Nip. 19770606 200801 2 020	II.a	58.	SARIFUDDIN Nip. 19741119 200901 1 002	II.a
59.	ILHAM Nip. 19660302 200901 1 003	II.a	60.	SARIFUDDIN Nip. 19720512 200701 1 030	II.a
61.	AKBAR NASIR Nip. 19690517 200604 1 008	II.a	62.	AKBAR Nip. 19721231 200801 1 060	II.a
63.	PALEWAI Nip. 19720521 200901 1 002	II.a	64.	MUH. DARWIS Nip. 19631231 200604 1 090	II.a`
65.	MUTMAINNAH R, S.Sos Nip. 19860720 201001 2 001	II.a	66.	HASANUDDIN Nip. 19700712 201001 1 002	II.a
67.	ABD. HAFID Nip. 19710301 200701 1 024	II.a			



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - 12 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
 - 13 Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 - 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
 - 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG
PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas/wewenang tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
22. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan Reklame baru diberikan setelah jumlah pajak yang ditetapkan untuk Reklame itu dibayar lunas.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame ditambah dengan Nilai Strategis Lokasi.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
NSR = NK + NSL
Keterangan :
NSR : Nilai Sewa Reklame
NK : Nilai Kontrak
NSL : Nilai Strategis Lokasi
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk reklame komersil dan 10% (sepuluh persen) untuk non komersil.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sinjai.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Reklame diselenggarakan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data subjek dan objek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian Laporan diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

BAB VII
PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VIII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 13

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain, STPD yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian laporan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 16

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB; dan
 - c. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.

Pasal 22



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

- pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Kekurangan pajak yang terutang pada STPD dalam tahun pajak berjalan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Tahun 1998 Seri A Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON / FAX (0411) 585 024, (PSW. 1165)

Nomor : 11313 /UN4.9.1/PL.02/2012

Makassar, 10 Oktober 2012

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN
PENELITIAN / WAWANCARA**

Kepada

Yth : **Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**

c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)

di-

Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin yang tersebut berikut ini :

Nama : Nurfadillah

No. Pokok : E21109261

Jurusan : Ilmu Administrasi

Prog. Studi : Administrasi Negara

Alamat : Minasa Indah Residence Blok D / No. 9

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Sinjai"**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan
mb. Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
19651109 199103 1 008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas Sebagai Laporan;
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unhas;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Bulu-Bulu Barat No. 1 Telp. (0482) 21131 Fax (0482) 21505 Sinjai

Sinjai, 10 Januari 2013

Nomor : 050/002/LITBANG/BAPPEDA
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
di-
T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
Nomor : 070.5.1/14.140/Balitbangda Tanggal 19 Desember 2012, peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURFADILLAH**
Nomor Pokok : E21109261
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Minasa Indah Residence Blok D/No. 9

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Daerah/instansi Saudara dalam rangka
penyusunan skripsi/tesis, dengan judul:

**"PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. SINJAI"**

Yang dilaksanakan dari bulan : **Januari s/d Februari 2013**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami **menyetujui**
kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
2. Penelitian ini tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar copy hasil penelitian kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Bappeda Kab. Sinjai;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan dipergunakan
seperlunya.

An. Kepala Bappeda Kab. Sinjai
Sub. Bid. Penelitian dan Pengembangan

Hj. Hikmahwati Arifuddin, S.Sos. MM
Pangkat : Penata Muda TK. I
NIP 19730914 199403 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Dekan FISIP UNHAS Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Bulu - Bulu Barat Telp. (0482) 21004 Kode Pos 92611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI

Nomor : 800/12.0019/Dispenda

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa :

Nama : NURFADILLAH
Nim : E21109261
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Minasa Indah Residence Blok D/No.9

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Wilayah kami dengan Judul Penelitian **“ PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI “** selama 2 (Dua) bulan, mulai bulan Januari S/d February 2013

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 25 Januari 2013

An. KEPALA DINAS
Sekretaris

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH, MH

Pangkat : Penata TK. I

Nip : 19761114 200003 1 002